

**REALISASI BELANJA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY
PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN**

**Yan Christin Br Sembiring¹, Wilda Deplora Br Tarigan², Poltak T. Parhusip³, Novi
Natalia Padang⁴, Romasi Lumbangaol⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo
Thomas

Email : yanchristin11@gmail.com¹, wildadeplora9@gmail.com², ikoparhusip17@gmail.com³,
novipadang06@gmail.com⁴, romasilumbangaol@yahoo.co.id⁵

ABSTRACT

This study aims to analyze the realization of the budget at the Social Service of the Medan City Government using the value for money approach. The research sample is in the form of a Budget Realization Report for 2022-2023. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation, with data analysis using the ratio of economy, efficiency, and effectiveness. The results of the study show that the average economic ratio in 2022 is 136.35% and 2023 is 118.52%, both of which are included in the very economic category, although there is a decrease of 17.82%. The efficiency ratio also decreased by 4.42%, with an average of 21.66% in 2022 and 17.24% in 2023, both of which are in the very efficient category. In contrast, the effectiveness ratio showed an increase of 11.03%, from an average of 73.34% (less effective) in 2022 to 84.37% (quite effective) in 2023. The realization of Medan City Social Service expenditure tends to be stable in the ratio of economy and efficiency, although there is a decrease in employee spending, capital spending, and grant spending. However, the effectiveness of spending is directly influenced by the low realization of the spending, which has the potential to affect the effectiveness of the program.

Keywords: *Expenditure Realization, Value for Money, Economic Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio*

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan aspek penting yang menyentuh berbagai bidang, termasuk pengelolaan anggaran dalam organisasi atau instansi pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik, pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan anggaran yang baik memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya pemborosan sumber daya.

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dalam sektor publik, anggaran berperan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Penyusunan anggaran yang strategis sangat penting untuk memastikan keberhasilan program yang direncanakan. Hal ini menjadi dasar bagi organisasi pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam RKA, indikator kinerja berupa input, output, dan outcome dirumuskan sebagai sasaran anggaran untuk setiap program dan kegiatan.

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan anggaran adalah kinerja keuangan yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan (Padang, 2024)

LRA juga menjadi dasar untuk menilai tingkat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dalam konteks Dinas Sosial Kota Medan, pengelolaan anggaran menjadi krusial karena instansi ini bertugas memberikan layanan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kota Medan mengelola berbagai jenis belanja, seperti belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja modal. Namun, data LRA tahun 2022–2023 menunjukkan adanya fluktuasi pada penyerapan realisasi pada jenis-jenis belanja tersebut. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 6,93%, belanja modal menurun sebesar 0,94%, sementara belanja hibah meningkat sebesar 33,73% tetapi realisasinya masih di bawah 50%. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan anggaran. Penyerapan realisasi belanja pegawai, belanja hibah dan belanja modal Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Penyerapan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Modal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan *Value For Money* (VFM) dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi. VFM menekankan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi (pengelolaan input dengan biaya terendah), efisiensi (maksimalisasi output dengan input tertentu), dan efektivitas (pencapaian outcome sesuai dengan tujuan). Dengan pendekatan ini, evaluasi pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada penghematan biaya tetapi juga pada hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran tersebut.

Pendekatan VFM telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menilai kinerja keuangan organisasi sektor publik. Penelitian sebelumnya oleh Nolasari dkk (2023) di Dinas Sosial Kota Palembang, Maidar (2022) di Dinas Sosial Kota Mataram, dan Kusumawati dkk (2022) di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue menunjukkan bahwa pendekatan VFM mampu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi belanja Dinas Sosial Kota Medan dengan pendekatan VFM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul “Realisasi Belanja dengan Pendekatan *Value For Money* pada Dinas Sosial Kota Medan” untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana pendekatan VFM dapat diterapkan dalam pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kota Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Mardiasmo (2018:62), anggaran adalah rencana keuangan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu tertentu. Anggaran dalam sektor publik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat perencanaan, pengendalian, alokasi sumber daya,

dan evaluasi kinerja. Pada sektor publik, anggaran mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Menurut Sumarsono (2010:57), penganggaran publik melibatkan proses politik dan ekonomi yang kompleks. Anggaran juga digunakan sebagai alat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis agar selaras dengan konsep *value for money*.

Menurut Dessler (2013:278), kinerja adalah pencapaian kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi. Hal ini terkait dengan pelaksana yang mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Halim & Kusufi (2019:142) menambahkan bahwa dalam sektor publik, pengukuran kinerja tidak hanya melihat efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap hasil yang dicapai.

Pengukuran kinerja adalah proses evaluasi pencapaian suatu kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Mardiasmo (2018:121) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi, serta untuk menetapkan penghargaan dan hukuman berdasarkan pencapaian yang objektif. Beberapa manfaat pengukuran kinerja antara lain adalah memberi pemahaman mengenai ukuran kinerja, arah pencapaian target, serta sebagai dasar evaluasi dan komunikasi dalam organisasi.

Indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator kinerja terdiri dari:

1. Masukan (input) adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan, seperti dana dan SDM.
2. Keluaran (output) adalah hasil langsung dari kegiatan yang dapat berupa produk atau jasa.
3. Hasil (outcome) adalah dampak jangka menengah yang menunjukkan efektivitas kegiatan.

Penggunaan indikator kinerja membantu memastikan kejelasan tujuan organisasi, pengembangan pengukuran yang jelas, dan dasar untuk evaluasi kinerja antar organisasi dan individu.

Value for money (VfM) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi sektor publik telah menggunakan sumber daya secara optimal. VfM mencakup tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018:5). Ketiga elemen ini bekerja sebagai kerangka kerja yang saling terkait untuk memastikan bahwa belanja publik memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dengan biaya yang seminimal mungkin.

Ekonomi berkaitan dengan perolehan input dengan kualitas tertentu pada harga terendah. Hal ini mencakup pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan spesifikasi namun tetap hemat biaya. Ekonomi adalah tahap awal dalam manajemen keuangan sektor publik yang bertujuan untuk menghindari pemborosan sumber daya.

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output, di mana organisasi diharapkan dapat memaksimalkan output dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. Efisiensi diukur berdasarkan tingkat produktivitas dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Efektivitas menilai apakah hasil atau outcome yang dicapai sesuai dengan rencana dan apakah program yang dilaksanakan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No. 114, Kecamatan Medan Sunggal. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2022-2023 yang dianalisis menggunakan konsep *Value for Money*. Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kota Medan dari tahun 1973 hingga 2023. Sampel yang digunakan adalah LRA dari tahun 2022-2023. Data diperoleh

melalui wawancara dengan pegawai terkait, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua pihak, yakni bagian keuangan dan bendahara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan laporan LRA. Data dianalisis menggunakan pendekatan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja anggaran. Langkah-langkah analisis mencakup pengumpulan data, pembahasan indikator input, output, dan outcome, serta perhitungan rasio untuk menilai kinerja anggaran Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan konsep *Value for Money*.

Operasionalisasi Variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

Pendekatan	Pengukuran	Kriteria
<p>Ekonomi Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir <i>input resources</i> yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak efektif (Mardiasmo, 2018:165)</p>	$Ekonomi = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah anggaran belanja Dinas Sosial Kota Medan • Input Value adalah realisasi belanja Dinas Sosial Kota Medan 	<p>Kriteria ekonomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. > 100% sangat ekonomis 2. 90% -100% ekonomis 3. 80% - 90% cukup ekonomis 4. 60% – 80% kurang ekonomis 5. < 60% tidak ekonomis <p>(Kepmendagri No.690.900-327 thn 1996)</p>
<p>Efisiensi Pencapaian <i>output</i> yang maksimum dengan penggunaan <i>input</i> yang terendah untuk mencapai <i>output</i> dengan standar atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018:165)</p>	$Efisiensi = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Output adalah realisasi belanja langsung Dinas Sosial Kota Medan • Input Value adalah realisasi belanja Dinas Sosial Kota Medan 	<p>Kriteria efisiensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. > 100% tidak efisien 2. 90% -100% kurang efisien 3. 80% - 90% cukup efisien 4. 60% – 80% efisien 5. < 60% sangat efisien <p>(Kepmendagri No.690.900-327 thn 1996)</p>
<p>Efektivitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan <i>outcome</i> dengan <i>output</i> (Mardiasmo, 2018:166)</p>	$Efektivitas = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outcome adalah realisasi belanja Dinas Sosial Kota Medan • Output adalah anggaran belanja Dinas Sosial Kota Medan 	<p>Kriteria efektivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. > 100% sangat efektif 2. 90% -100% efektif 3. 80% - 90% cukup efektif 4. 60% – 80% kurang efektif 5. < 60% tidak efektif <p>(Kepmendagri No.690.900-327 thn 1996)</p>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Proses Penganggaran hingga Realisasi Belanja Dinas Sosial Kota Medan

a. Proses Penganggaran Belanja Dinas Sosial Kota Medan

Proses penganggaran di Dinas Sosial Kota Medan melibatkan beberapa tahapan yang sesuai dengan peraturan keuangan daerah

1) Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah):

Dokumen ini menjadi dasar perencanaan tahunan, disusun oleh Bappeda melalui Musrenbang. Dinas Sosial mengusulkan program sesuai arah kebijakan daerah.

- 2) Penyusunan Renja SKPD:
Berdasarkan RKPD, Dinas Sosial menyusun Rencana Kerja SKPD, mencakup program sosial seperti bantuan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi masyarakat.
- 3) Penyusunan RKA SKPD:
Renja yang disetujui diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), berisi rincian pendapatan dan belanja menggunakan aplikasi e-budgeting atau SIMDA.
- 4) Pembahasan RKA:
RKA dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD untuk memastikan kesesuaian dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- 5) Pengesahan APBD:
RKA yang telah disetujui dimasukkan dalam APBD dan disahkan melalui Peraturan Daerah.
- 6) Penyusunan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran):
DPA adalah dokumen final yang memuat rincian anggaran untuk pelaksanaan program yang telah disetujui.
- 7) Pelaksanaan Program:
Program sosial seperti bantuan dan pelatihan masyarakat dilaksanakan berdasarkan DPA, yang menjadi acuan untuk pengeluaran anggaran.

b. Proses Realisasi Belanja Dinas Sosial Kota Medan

Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui tiga mekanisme utama: swakelola, e-katalog melalui SiRUP, dan pengadaan langsung. Masing-masing metode berpedoman pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 1) Belanja Swakelola:
Swakelola melibatkan pelaksanaan kegiatan oleh instansi sendiri, masyarakat, atau lembaga tertentu. Proses ini meliputi:
 - a) Perencanaan: Penyusunan kebutuhan anggaran, tenaga kerja, dan material.
 - b) Pelaksanaan: Dilaksanakan oleh tenaga internal atau pihak terkait.
 - c) Pertanggungjawaban: Pelaporan penggunaan dana dan hasil kegiatan.
- 2) Belanja E-Katalog melalui SiRUP:
E-katalog menyediakan akses pengadaan elektronik melalui katalog LKPP. Tahapan proses meliputi:
 - a) Pengisian SiRUP: Pencatatan rencana umum pengadaan.
 - b) Pemilihan Penyedia: Memilih penyedia barang/jasa yang terdaftar.
 - c) Pembelian dan Pembayaran: Barang/jasa dibeli langsung berdasarkan harga katalog dan dibayar setelah penerimaan barang.
3. Belanja Pengadaan Langsung:
Metode ini digunakan untuk pengadaan dengan nilai di bawah batas tertentu. Tahapan meliputi:
 - a) Identifikasi Kebutuhan: Penentuan kebutuhan barang/jasa.
 - b) Pemilihan Penyedia: Penyedia dipilih langsung berdasarkan kualifikasi dan harga terbaik.
 - c) Negosiasi dan Kontrak: Kesepakatan harga dan spesifikasi.
 - d) Pelaksanaan dan Pembayaran: Pemeriksaan barang/jasa dan pencairan dana sesuai prosedur.

2. Rasio Ekonomi

Hasil perhitungan rasio ekonomi Dinas Sosial Kota Medan tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Rasio Ekonomi

RASIO EKONOMI				
Tahun	Belanja	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1		2	3	$4=(2/3)*100$
2022	A. Belanja Tidak Langsung	89.321.020.856	65.230.408.433	136,93%
	Belanja Pegawai	7.566.505.000	7.300.856.433	103,64%
	Belanja Hibah	9.292.414.935	1.150.000.000	808,04%
	Belanja Bantuan Sosial	72.462.100.921	56.779.552.000	127,62%
	B. Belanja Langsung	24.203.545.078	18.030.510.066	134,24%
	Belanja Pegawai	57.390.000	43.200.000	132,85%
	Belanja Barang dan Jasa	21.236.509.578	15.949.934.576	133,14%
	Belanja Modal	2.909.645.500	2.037.375.490	142,81%
	Total	113.524.565.934	83.260.918.499	136,35%
			Rata-rata	241,35%
			Max	808,04%
			Min	103,64%
2023	A. Belanja Tidak Langsung	89.972.389.673	77.472.617.619	116,13%
	Belanja Pegawai	8.930.179.072	7.979.168.919	111,92%
	Belanja Hibah	4.012.423.901	1.850.000.000	216,89%
	Belanja Bantuan Sosial	77.029.786.700	67.643.448.700	113,88%
	B. Belanja Langsung	20.972.388.112	16.133.502.170	129,99%
	Belanja Pegawai	136.810.000	126.960.000	107,76%
	Belanja Barang dan Jasa	19.983.094.495	15.417.627.404	129,61%
	Belanja Modal	852.483.617	588.914.766	144,76%
	Total	110.944.777.785	93.606.119.789	118,52%
			Rata-rata	137,47%
			Max	216,89%
			Min	107,76%

3. Rasio Efisiensi

Hasil perhitungan rasio efisiensi Dinas Sosial Kota Medan tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3 Rasio Efisiensi

RASIO EFISIENSI				
Tahun	Belanja	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1		2	3	$4=(2/3)*100$
2022	Belanja Langsung	8.030.510.066	83.260.918.499	21,66%
	Belanja Pegawai	43.200.000		
	Belanja Barang dan Jasa	15.949.934.576		

	Belanja Modal	2.037.375.490		
2023	Belanja Langsung	16.133.502.170	93.606.119.789	17,24%
	Belanja Pegawai	126.960.000		
	Belanja Barang dan Jasa	15.417.627.404		
	Belanja Modal	588.914.766		
			Rata-rata	19,45%
			Max	21,66%
			Min	17,24%

4. Rasio Efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas Dinas Sosial Kota Medan tahun 2022- 2023 dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Rasio Efektivitas

RASIO EFEKTIVITAS				
Tahun	Belanja	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
1		2	3	$4=(3/2)*100$
2022	A. Belanja Tidak Langsung	89.321.020.856	65.230.408.433	73,03%
	Belanja Pegawai	7.566.505.000	7.300.856.433	96,49%
	Belanja Hibah	9.292.414.935	1.150.000.000	12,38%
	Belanja Bantuan Sosial	72.462.100.921	56.779.552.000	78,36%
	B. Belanja Langsung	24.203.545.078	18.030.510.066	74,50%
	Belanja Pegawai	Rp 57.390.000	43.200.000	75,27%
	Belanja Barang dan Jasa	21.236.509.578	15.949.934.576	75,11%
	Belanja Modal	2.909.645.500	2.037.375.490	70,02%
	Total	113.524.565.934	83.260.918.499	73,34%
			Rata-rata	67,94%
			Max	96,49%
		Min	12,38%	
2023	A. Belanja Tidak Langsung	89.972.389.673	77.472.617.619	86,11%
	Belanja Pegawai	8.930.179.072	7.979.168.919	89,35%
	Belanja Hibah	4.012.423.901	1.850.000.000	46,11%
	Belanja Bantuan Sosial	77.029.786.700	67.643.448.700	87,81%
	B. Belanja Langsung	20.972.388.112	16.133.502.170	76,93%
	Belanja Pegawai	136.810.000	126.960.000	92,80%
	Belanja Barang dan Jasa	19.983.094.495	15.417.627.404	77,15%
	Belanja Modal	852.483.617	588.914.766	69,08%
	Total	110.944.777.785	93.606.119.789	84,37%
			Rata-rata	77,05%
			Max	92,80%
		Min	46,11%	

PEMBAHASAN

1. Indikator Kinerja

a. Input

Indikator input (masukan) mencakup segala hal yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti dana, SDM, sarana, informasi, dan kebijakan. Fokusnya adalah memastikan sumber daya tersedia dan digunakan secara efisien.

1) Dana

Dana harus sesuai perencanaan dan memenuhi kebutuhan program tepat waktu. Sumbernya berasal dari APBD untuk belanja barang, jasa, dan infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara alokasi dana telah sesuai dengan kebutuhan program dan pelaksanaan dana mengikuti aturan seperti Perpres No. 53 Tahun 2023, yang memastikan transparansi dan efisiensi.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM meliputi aparatur pemerintah dan tenaga kerja pendukung yang memiliki kompetensi sesuai tugas. SDM cukup dan terlatih untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas SDM terstruktur untuk mencegah tumpang tindih.

3) Sumber Daya Fisik

Sarana mencakup fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang mendukung program. Peralatan dalam kondisi baik, dan infrastruktur memadai dan sarana dirawat untuk mencegah kerusakan.

4) Informasi dan Data

Data akurat mendukung pengambilan keputusan. Informasi kebutuhan program tersedia melalui teknologi seperti SiRUP dan informasi anggaran dan kegiatan tersedia untuk pemangku kepentingan.

5) Peraturan atau Kebijakan

Peraturan memastikan kegiatan sesuai aturan. Program mengikuti Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang SHSR dan SSH menjadi pedoman penetapan harga untuk transparansi dan akuntabilitas.

b) Output

Indikator keluaran (output) adalah hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan atau belanja, baik fisik maupun non-fisik, yang menggambarkan pencapaian nyata dari penggunaan anggaran. Dalam konteks *Value for Money* (VfM), output menunjukkan sejauh mana kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa belanja fisik, seperti pengadaan barang atau pembangunan fasilitas, telah direalisasikan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c) Outcome

Outcomes adalah hasil jangka menengah yang mencerminkan dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan atau belanja. Berbeda dengan output, outcomes mengukur sejauh mana barang atau jasa yang dihasilkan memberikan manfaat nyata atau dampak positif dalam mencapai tujuan program. Dalam konteks *Value for Money* (VfM), outcomes menggambarkan efektivitas pengelolaan sumber daya dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.

Dari wawancara, hasil belanja telah dimanfaatkan secara optimal, menunjukkan efektivitas penggunaannya untuk mendukung kegiatan yang direncanakan, seperti peralatan kantor meningkatkan produktivitas dan kelancaran administrasi, kendaraan dinas mendukung mobilitas tim untuk tugas lapangan, fasilitas infrastruktur dimanfaatkan sesuai rencana, mendukung operasional organisasi. Efek Langsung outcome adalah barang dan fasilitas yang diadakan meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, proses

kerja menjadi lebih cepat dan tepat sasaran dan terlihat dari peningkatan aksesibilitas atau kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2. Kinerja Realisasi Belanja diukur dari Rasio Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi Dinas Sosial Kota Medan yang terdapat pada tabel 2, kategori kriteria rasio ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5 Kriteria Rasio Ekonomi Dinas Sosial Kota Medan
Tahun 2022-2023**

Tahun	Belanja	Persentase	Kriteria
2022	A. Belanja Tidak Langsung	136,93%	Sangat Ekonomis
	Belanja Pegawai	103,64%	Sangat Ekonomis
	Belanja Hibah	808,04%	Sangat Ekonomis
	Belanja Bantuan Sosial	127,62%	Sangat Ekonomis
	B. Belanja Langsung	134,24%	Sangat Ekonomis
	Belanja Pegawai	132,85%	Sangat Ekonomis
	Belanja Barang dan Jasa	133,14%	Sangat Ekonomis
	Belanja Modal	142,81%	Sangat Ekonomis
Total		136,35%	Sangat Ekonomis
Rata-rata		241,35%	Sangat Ekonomis
2023	A. Belanja Tidak Langsung	116,13%	Sangat Ekonomis
	Belanja Pegawai	111,92%	Sangat Ekonomis
	Belanja Hibah	216,89%	Sangat Ekonomis
	Belanja Bantuan Sosial	113,88%	Sangat Ekonomis
	B. Belanja Langsung	129,99%	Sangat Ekonomis
	Belanja Pegawai	107,76%	Sangat Ekonomis
	Belanja Barang dan Jasa	129,61%	Sangat Ekonomis
	Belanja Modal	144,76%	Sangat Ekonomis
Total		118,52%	Sangat Ekonomis
Rata-rata		137,47%	Sangat Ekonomis

Berdasarkan tabel 5 Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat ekonomis pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio ekonomi lebih dari 100%. Pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kota Medan tercermin dalam upaya memanfaatkan anggaran secara hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi kualitas barang/jasa. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan mengikuti Satuan Standar Harga (SSH) yang ditetapkan pemerintah. SSH adalah pedoman harga barang/jasa yang disusun berdasarkan kondisi pasar lokal dan digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Dengan mengacu pada SSH, Dinas Sosial Kota Medan memastikan bahwa barang/jasa yang dibeli tidak melebihi harga pasar yang telah ditetapkan. Penerapan SSH membantu memastikan belanja dilakukan secara hemat dan sesuai anggaran, dengan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan tanpa mengurangi kualitas. Kepatuhan terhadap SSH juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kota Medan.

3. Kinerja Realisasi Belanja diukur dari Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Dinas Sosial Kota Medan yang terdapat pada tabel 3, kategori kriteria rasio efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6 Kriteria Rasio Efisiensi Dinas Sosial Kota Medan
Tahun 2022-2023**

Tahun	Belanja	Persentase	Kriteria
2022	B. Belanja Langsung	21,66%	Sangat Efisien

	Belanja Pegawai		Sangat Efisien
	Belanja Barang dan Jasa		Sangat Efisien
	Belanja Modal		Sangat Efisien
2023	B. Belanja Langsung	17,24%	Sangat Efisien
	Belanja Pegawai		Sangat Efisien
	Belanja Barang dan Jasa		Sangat Efisien
	Belanja Modal		Sangat Efisien
	Rata-rata	19,45%	Sangat Efisien

Berdasarkan Tabel 6, semua anggaran belanja Dinas Sosial Kota Medan pada tahun 2022-2023 masuk dalam kriteria sangat efisien. Dengan capaian rasio efisiensi yang kurang dari 60%, anggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai sangat efisien. Efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Sosial Kota Medan tercermin dari penggunaan sumber daya (anggaran, tenaga, waktu) untuk mencapai output maksimal. Dinas Sosial berupaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil optimal melalui perencanaan matang, pelaksanaan terarah, dan pemanfaatan metode pengadaan sesuai regulasi. Efisiensi ini terlihat dari kemampuan Dinas Sosial mengoptimalkan anggaran tanpa mengurangi kualitas barang/jasa atau dampak program yang dilaksanakan.

4. Kinerja Realisasi Belanja diukur dari Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Dinas Sosial Kota Medan yang terdapat pada tabel 4, kategori kriteria rasio efisiensi tersebut dapat dilihat pada tabel 7.

**Tabel 7 Kriteria Rasio Efektivitas Dinas Sosial Kota Medan
 Tahun 2022-2023**

Tahun	Belanja	Persentase	Kriteria
2022	A. Belanja Tidak Langsung	73,03%	Kurang Efektif
	Belanja Pegawai	96,49%	Efektif
	Belanja Hibah	12,38%	Tidak Efektif
	Belanja Bantuan Sosial	78,36%	Kurang Efektif
	B. Belanja Langsung	74,50%	Kurang Efektif
	Belanja Pegawai	75,27%	Kurang Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	75,11%	Kurang Efektif
	Belanja Modal	70,02%	Kurang Efektif
	Total	73,34%	Kurang Efektif
	Rata-rata	67,94%	Kurang Efektif
2023	A. Belanja Tidak Langsung	86,11%	Cukup Efektif
	Belanja Pegawai	89,35%	Cukup Efektif
	Belanja Hibah	46,11%	Tidak Efektif
	Belanja Bantuan Sosial	87,81%	Cukup Efektif
	B. Belanja Langsung	76,93%	Kurang Efektif
	Belanja Pegawai	92,80%	Efektif
	Belanja Barang dan Jasa	77,15%	Kurang Efektif
	Belanja Modal	69,08%	Kurang Efektif
	Total	84,37%	Cukup Efektif
	Rata-rata	77,05%	Kurang Efektif

Berdasarkan hasil analisis, rasio efektivitas anggaran Dinas Sosial Kota Medan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, rasio efektivitas belanja langsung dan tidak

langsung berada dalam kategori kurang efektif, dengan capaian antara 60%-80%. Meskipun ada peningkatan efisiensi, beberapa fenomena, seperti penurunan belanja pegawai, rendahnya belanja hibah, dan penurunan belanja modal, mempengaruhi efektivitas program. Penurunan belanja pegawai sebesar 6,93% pada tahun 2023 menunjukkan efisiensi, namun bisa berdampak negatif jika mengurangi kinerja dan kualitas pelayanan. Belanja hibah yang terealisasi rendah, terutama pada tahun 2022 dan 2023, mengindikasikan bahwa dana hibah belum dimanfaatkan secara optimal, mempengaruhi program-program yang membutuhkan kolaborasi pihak ketiga. Penurunan belanja modal mengurangi investasi pada aset yang dapat mendukung kualitas pelayanan jangka panjang, seperti infrastruktur dan peralatan.

Meskipun ada peningkatan total rasio efektivitas dari 73,03% (2022) menjadi 86,11% (2023) pada belanja tidak langsung, dan rasio efektivitas belanja langsung meningkat sedikit, program seperti bantuan sosial dan penanganan bencana masih belum mencapai target hasil yang optimal. Misalnya, bantuan sosial yang terealisasi hanya 87,74% pada tahun 2023, dan program penanganan bencana yang hanya terealisasi 59,04% pada 2022, menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan dan distribusi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program adalah kurangnya analisis kebutuhan yang komprehensif, masalah koordinasi dengan mitra, dan hambatan logistik dalam distribusi bantuan. Untuk meningkatkan efektivitas, Dinas Sosial perlu memperbaiki perencanaan, meningkatkan koordinasi dengan mitra, dan memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengevaluasi program secara lebih efektif. Evaluasi dampak program juga perlu dilakukan agar outcome yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis realisasi anggaran belanja untuk mengukur kinerja anggaran Dinas Sosial Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Sosial telah mengelola anggaran dengan ekonomis melalui metode pengadaan yang bervariasi (e-katalog, SiRUP, swakelola, pengadaan langsung) untuk memastikan barang/jasa diperoleh dengan harga wajar dan mendukung program strategis.
2. Dinas Sosial Kota Medan telah mencapai efisiensi pengelolaan anggaran dengan peningkatan tingkat serapan anggaran pada 2023. Penggunaan e-katalog dan SiRUP mempercepat pengadaan, memastikan kegiatan tepat waktu, serta meminimalkan pemborosan dalam bantuan sosial dan penanganan bencana.
3. Dengan rata-rata rasio efektivitas 78,86% menunjukkan pengelolaan anggaran Dinas Sosial yang belum optimal, terutama dalam pencapaian target program bantuan sosial dan penanganan bencana, terhambat oleh perencanaan dan distribusi yang tidak merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dessler, G. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Ed.10.). Klaten: Intan Sejati Klaten.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawati, O., Animah, A., & Isnawati, I. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Sosial Kota Mataram. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(5), 643–649. Universitas Muhammadiyah Jember. Retrieved July 6, 2024, from <https://doi.org/10.32528/nms.v1i5.216>
- Maidar, R. H. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kominukasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2020. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, X(6). Retrieved July 9, 2024, from <https://doi.org/10.32672/jsa.v10i6.4779>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Ed. IV.). Yogyakarta: Andi Offset.

- Nolasari, M., Maria, & Nurhasanah. (2023). Realisasi Belanja dengan Pendektaan Value For Money pada Dinas Sosial Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 501–511. Retrieved July 3, 2024, from <https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i2.70>
- Padang, N. N. (2024). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , 10(2), 146–157. Retrieved December 1, 2024, from <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4087>
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.